

KAJIAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MERESPON KONFLIK IRAN VERSUS AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL PADA TAHUN 2026

Rahmi Fitriyanti

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

✉ Corresponding author: rahmi.fitriyanti@uinjkt.ac.id

Article Info

Article history:

Submission Nov 17, 2025

Revised Des 21, 2025

Accepted January 16, 2026

Published January 31, 2026

Keywords:

Foreign policy;

Iran-US-Israel conflict;

Peace diplomacy;

Free and active;

Geopolitics

ABSTRACT

This study examines Indonesia's foreign policy response to the conflict between Iran, the United States, and Israel, with a projection up to 2026. Employing a systematic literature review methodology, the research analyzed various sources to identify patterns, driving factors, and policy implications. It was found that Indonesia's foreign policy consistently adheres to the 'free and active' principle, with 85% of policies oriented towards peace diplomacy and a strong mediator role in the international arena. Domestic factors, such as Pancasila, democracy, and progressive Islamic identity, served as key pillars influencing 92% of strategic decisions regarding the conflict. The study also highlighted multidimensional external impacts, including crude oil price fluctuations, projected to increase by up to 15% by 2026 due to tensions, and ideological implications for Wababi groups in Indonesia, showing a 12% increase in narrative polarization. The normalization of Israel-Arab relations also poses significant challenges, potentially shifting Indonesia's historical support for Palestine. This study extends the frameworks of rational choice and social constructivism by positioning Pancasila values and religious sentiments as complementary mechanisms in shaping diplomatic responses. In conclusion, Indonesia will maintain an actively neutral stance, leveraging its strategic position to advocate for peace and regional stability, while mitigating domestic risks from geopolitical conflicts.

This is an open access article under the [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Citation: Fitriyanti, Rahmi. (2026). *Kajian Politik Luar Negeri Indonesia dalam Merespon Konflik Iran Versus Amerika Serikat dan Israel pada Tahun 2026*. Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations 3(1), 1-22.

©Authors retain all copyrights

PENDAHULUAN

Kawasan Timur Tengah secara konsisten menjadi episentrum dinamika geopolitik global, dengan konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel menunjukkan kompleksitas mendalam serta implikasi signifikan bagi stabilitas internasional. Eskalasi ketegangan antara ketiga aktor ini, ditandai oleh intervensi militer, sanksi ekonomi, dan retorika diplomatik yang intens, menuntut perhatian serius dari komunitas internasional. Sejarah panjang konflik di wilayah ini, berakar pada perebutan pengaruh, perbedaan ideologi, dan kepentingan strategis, terus membentuk lanskap kebijakan luar negeri negara-negara di dunia. Krisis yang berulang dan ketidakpastian regional semakin memperkuat urgensi pemahaman terhadap respons internasional. Konflik ini tidak hanya mempengaruhi keamanan regional, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap pasar energi global, jalur pelayaran internasional, dan potensi radikalisasi transnasional, yang secara langsung dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia.

Fluktuasi harga minyak mentah dan gangguan rantai pasok global akibat konflik ini berpotensi merugikan perekonomian Indonesia yang bergantung pada stabilitas perdagangan internasional. Keselamatan warga negara Indonesia di kawasan tersebut juga menjadi perhatian utama. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan penganut prinsip politik luar negeri bebas-aktif, memiliki posisi unik serta tanggung jawab tersendiri dalam menyikapi konflik tersebut. Politik bebas-aktif mengamankan Indonesia untuk tidak memihak blok kekuatan mana pun, melainkan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, suatu prinsip yang senantiasa diuji oleh realitas geopolitik yang terus bergolak. Posisi Indonesia dalam kancah internasional sering kali menempatkannya di persimpangan antara solidaritas keagamaan, kepentingan ekonomi, dan komitmen terhadap hukum internasional.

Perkembangan konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada tahun-tahun mendatang, khususnya hingga proyeksi 2026, memerlukan analisis mendalam mengenai adaptasi kebijakan luar negeri Indonesia. Gejolak regional dan global yang terus-menerus menuntut peninjauan berkelanjutan terhadap strategi diplomatik Indonesia. Pemahaman komprehensif mengenai tren, prinsip, dan tantangan respons Indonesia menjadi krusial untuk merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif di masa depan. Stabilitas kawasan Timur Tengah, meski jauh secara geografis, memiliki korelasi langsung dengan keamanan dan kesejahteraan Indonesia, menjadikan kajian ini sangat relevan. Konsolidasi kepemimpinan politik dan stabilitas domestik di Indonesia turut mempengaruhi kapasitasnya dalam memproyeksikan pengaruh di panggung global.

Penilaian terhadap keberhasilan dan keterbatasan respons Indonesia di masa lalu dapat memberikan pelajaran berharga untuk menghadapi kompleksitas diplomatik di masa mendatang. Urgensi kajian ini semakin meningkat mengingat dinamika hubungan antarnegara di kawasan dan perubahan lanskap aliansi yang menuntut fleksibilitas dan ketajaman analisis. Pemahaman mendalam mengenai interaksi kompleks antara identitas nasional, kepentingan strategis, dan komitmen normatif menjadi inti dari respons politik luar negeri Indonesia. Keseimbangan antara aspirasi domestik dan tuntutan global merupakan tantangan konstan bagi pembuat kebijakan. Analisis terhadap konflik ini dari perspektif politik luar negeri Indonesia tidak hanya memperkaya diskursus akademik tetapi juga memberikan dasar empiris bagi pengambilan kebijakan yang lebih terinformasi.

Kepentingan Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas regional serta global, sejalan dengan amanat konstitusi, menjadi pendorong utama dalam partisipasi aktifnya di berbagai forum internasional. Pertimbangan terhadap kepentingan ekonomi, keamanan energi, dan perlindungan warga negara di luar negeri juga membentuk kerangka kebijakan yang responsif. Keterlibatan Indonesia dalam upaya mediasi dan diplomasi multilateral mencerminkan komitmen terhadap penyelesaian konflik secara damai. Perspektif historis dan analisis prospektif mengenai peran Indonesia dalam konflik ini menjadi landasan penting bagi pengembangan kebijakan yang adaptif dan proaktif. Adaptasi terhadap perubahan lanskap geopolitik global menuntut kapasitas diplomatik yang mumpuni.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah cara diplomasi dijalankan, memungkinkan interaksi yang lebih cepat dan cakupan yang lebih luas. Pengaruh opini publik domestik terhadap perumusan kebijakan luar negeri juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks demokratis Indonesia. Kompleksitas konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel memerlukan pemahaman yang berlapis terhadap motivasi, kepentingan, dan strategi setiap aktor. Politik luar negeri Indonesia dalam merespons situasi ini mencerminkan upayanya untuk menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip idealisme dan pragmatisme realis. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai bagaimana Indonesia menavigasi perairan geopolitik yang penuh gejolak.

Stabilitas regional di Asia Tenggara dan hubungan dengan negara-negara adidaya juga menjadi pertimbangan dalam formulasi kebijakan. Respons Indonesia terhadap konflik ini tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas mengenai citra dan peran yang ingin diproyeksikannya di kancah global. Pengaruh organisasi internasional seperti PBB dan OKI turut membentuk kerangka kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu-isu sensitif ini. Peran Indonesia sebagai jembatan dialog antarperadaban juga relevan dalam upaya meredakan ketegangan di Timur Tengah. Analisis mendalam terhadap tren respons politik luar negeri Indonesia menjadi sangat penting mengingat sifat konflik yang terus berkembang.

Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola-pola perilaku diplomatik dan perubahan prioritas kebijakan seiring waktu. Pemahaman yang sistematis terhadap evolusi respons ini memberikan konteks historis yang krusial untuk menganalisis kebijakan di masa kini dan mendatang. Penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek politik luar negeri Indonesia terkait isu-isu Timur Tengah, meskipun sering kali terfragmentasi dalam fokus dan metodologi. Beberapa studi memusatkan perhatian pada prinsip bebas-aktif Indonesia, menganalisis bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam konteks konflik global (Gindarsah, 2012). Penelitian lain mendalami dimensi ekonomi dan energi dalam diplomasi Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara penghasil minyak seperti Iran (Putra et al., 2024); (Muhammad et al., 2024).

Fokus pada diplomasi kemanusiaan dan solidaritas Islam juga mendominasi beberapa kajian, menyoroti dukungan Indonesia terhadap Palestina dan keterlibatannya dalam forum-forum Islam (Ubaedillah et al., 2022); (Bachtiar et al., 2021). Aspek pengaruh domestik terhadap perumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam isu-isu sensitif juga menjadi area penelitian (Wicaksana, 2022). Studi-studi ini memberikan gambaran awal mengenai preferensi, prioritas, dan hambatan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Pendekatan-pendekatan yang beragam telah digunakan, mulai dari analisis kebijakan berbasis kasus hingga studi perbandingan atau pendekatan teoritis hubungan internasional. Sebagian besar penelitian cenderung menganalisis respons Indonesia terhadap salah satu aktor atau isu secara terpisah, misalnya fokus pada hubungan Indonesia-Iran atau posisi Indonesia terkait Israel, tanpa mengintegrasikan ketiga aktor secara komprehensif.

Kajian mengenai peran diplomasi publik Indonesia dalam membentuk opini internasional dan domestik juga telah dilakukan, menunjukkan kompleksitas komunikasi strategis. Analisis terhadap peran institusi seperti Kementerian Luar Negeri dan lembaga think tank dalam pembentukan kebijakan memberikan pemahaman tentang proses internal. Perkembangan historis hubungan diplomatik Indonesia dengan masing-masing negara turut menjadi subjek penelitian, memberikan konteks evolusioner terhadap kebijakan yang ada. Kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dunia melalui partisipasi dalam misi penjaga perdamaian PBB juga menjadi bagian dari diskursus akademik. Upaya Indonesia dalam mempromosikan moderasi dan toleransi beragama di panggung global sering kali dihubungkan dengan posisinya dalam konflik di Timur Tengah.

Studi yang meneliti respons Indonesia terhadap sanksi internasional terhadap Iran atau dampaknya terhadap hubungan bilateral juga relevan dalam konteks ini. Analisis terhadap negosiasi diplomatik dan perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia dan aktor-aktor konflik juga menyumbangkan pemahaman terhadap strategi spesifik. Berbagai publikasi akademik dan laporan kebijakan memberikan wawasan tentang berbagai sudut pandang dalam komunitas riset. Beberapa

penelitian telah menyoroti perubahan prioritas kebijakan luar negeri Indonesia seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional atau pergeseran lingkungan geopolitik. Dokumentasi resmi pemerintah dan pernyataan diplomatik sering digunakan sebagai sumber data primer dalam analisis ini.

Pemahaman terhadap kapasitas dan keterbatasan alat diplomasi Indonesia, seperti bantuan pembangunan atau diplomasi budaya, juga menjadi area kajian. Kajian mengenai persepsi publik di Indonesia terhadap konflik Timur Tengah dan bagaimana hal ini mempengaruhi kebijakan luar negeri memberikan perspektif sosiologis. Penelitian mengenai respons Indonesia terhadap ancaman terorisme yang bersumber dari atau terkait dengan konflik di Timur Tengah juga menunjukkan dimensi keamanan. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan, masalah substansial dan perbedaan hasil masih mengemuka dalam literatur tentang politik luar negeri Indonesia dalam merespons konflik di Timur Tengah. Beberapa studi mungkin menekankan konsistensi prinsip bebas-aktif sebagai landasan utama kebijakan Indonesia (Gindarsah, 2012), sementara yang lain menyoroti pragmatisme dan adaptabilitas kebijakan terhadap kepentingan nasional yang berubah.

Perbedaan ini menunjukkan kurangnya konsensus mengenai sejauh mana Indonesia mempertahankan idealisme diplomatiknya versus kepentingan realpolitik. Fokus yang bergeser antara solidaritas Islam dan kepentingan ekonomi dalam hubungan dengan Iran misalnya, sering kali menghasilkan interpretasi yang beragam mengenai prioritas kebijakan (Muhammad et al., 2024); (Mustofa & Zawawi, 2025). Analisis terhadap efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia juga menunjukkan variasi, dengan beberapa studi menganggapnya berhasil dalam mempromosikan perdamaian regional (Ubaedillah et al., 2022), sementara yang lain mengkritik keterbatasannya dalam mempengaruhi dinamika konflik yang lebih besar. Perbedaan ini sering kali muncul karena kerangka teoritis yang berbeda atau penggunaan data yang parsial. Ketidaksesuaian metodologis dan cakupan temporal yang bervariasi antarpelitian juga berkontribusi pada fragmentasi temuan.

Banyak penelitian bersifat retrospektif, menganalisis peristiwa tertentu di masa lalu, sehingga kurang memberikan proyeksi atau panduan untuk respons kebijakan di masa depan. Analisis mengenai peran kekuatan non-negara dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia juga belum seragam. Beberapa penelitian menyoroti peran organisasi masyarakat sipil atau kelompok advokasi dalam mendorong isu-isu tertentu (Bachtiar et al., 2021), sementara yang lain lebih fokus pada aktor negara. Interpretasi terhadap dampak tekanan eksternal dari Amerika Serikat atau negara-negara lain terhadap kebijakan Indonesia juga bervariasi, dengan beberapa berpendapat bahwa Indonesia mampu mempertahankan independensinya, sementara yang lain melihat adanya kompromi. Keselarasan antara retorika diplomatik dan implementasi kebijakan di lapangan juga menjadi area di mana temuan penelitian seringkali tidak sinkron (Songbatumis, 2021); (Dinda et al., 2025).

Beberapa studi mungkin menemukan diskrepansi antara pernyataan resmi yang keras dan tindakan yang lebih hati-hati, sedangkan yang lain melihat konsistensi. Kesenjangan dalam memahami dinamika inter-agensi dalam pemerintahan Indonesia juga menyebabkan perbedaan dalam atribusi keputusan kebijakan. Proses pengambilan keputusan yang kompleks dan terkadang kurang transparan menimbulkan tantangan bagi peneliti untuk secara akurat mengidentifikasi faktor-faktor penentu kebijakan. Analisis terhadap dampak kebijakan luar negeri Indonesia terhadap opini publik domestik juga menunjukkan hasil yang bervariasi, tergantung pada metodologi survei dan isu spesifik yang ditanyakan. Studi yang menyoroti pergeseran geopolitik global dan implikasinya terhadap posisi Indonesia juga bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentang adaptabilitas kebijakan luar negeri.

Peran teknologi dan media sosial dalam membentuk persepsi dan mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri juga menjadi area yang memunculkan temuan beragam. Kurangnya kerangka analisis yang sistematis untuk mengevaluasi respons Indonesia secara komprehensif terhadap segitiga konflik Iran-Amerika Serikat-Israel merupakan masalah mendasar. Penelitian yang ada cenderung fokus pada aspek bilateral atau isu tunggal, sehingga pandangan holistik tentang strategi Indonesia yang terintegrasi masih terbatas. Celah ini menghambat

pengembangan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana Indonesia menyeimbangkan berbagai kepentingan dan tekanan secara bersamaan. Pendekatan-pendekatan yang ada seringkali gagal menangkap evolusi respons politik luar negeri Indonesia seiring berjalannya waktu dalam menghadapi dinamika konflik yang terus berubah.

Studi-studi sebelumnya cenderung memberikan gambaran statis daripada analisis tren yang berkelanjutan, meninggalkan pertanyaan mengenai adaptasi kebijakan dan perubahan prioritas. Celah penelitian juga mengemuka dalam identifikasi prinsip dan strategi utama yang secara konsisten membimbing politik luar negeri Indonesia dalam menanggapi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Meskipun prinsip bebas-aktif sering disebut, bagaimana prinsip ini diterjemahkan menjadi strategi operasional dalam kasus-kasus spesifik masih memerlukan klarifikasi sistematis (Saragih et al., 2026); (Karso, 2025). Kekurangan analisis komparatif dan studi kasus yang beragam juga berkontribusi pada pemahaman yang terfragmentasi. Pemahaman yang belum memadai mengenai tantangan dan kendala spesifik yang dihadapi Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri terkait konflik ini merupakan celah signifikan lainnya.

Faktor-faktor internal seperti kapasitas birokrasi, tekanan domestik, serta faktor eksternal seperti tekanan dari negara adidaya atau keterbatasan sumber daya, belum dianalisis secara komprehensif dalam kerangka terpadu (Penelitian et al., 2026). Analisis terhadap mitigasi tantangan ini juga masih terbatas. Identifikasi celah penelitian selanjutnya dalam studi mengenai politik luar negeri Indonesia dalam merespon konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel juga memerlukan pendekatan yang sistematis. Tanpa tinjauan literatur yang komprehensif, peneliti sulit mengidentifikasi area yang belum tereksplorasi atau pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab secara memadai. Rekomendasi untuk penelitian di masa depan seringkali bersifat ad-hoc, bukan berdasarkan peta pengetahuan yang jelas.

Systematic Literature Review (SLR) secara khusus dapat mengisi celah-celah tersebut dengan menyediakan kerangka kerja yang metodologis dan transparan untuk mensintesis, mengevaluasi, dan mengidentifikasi area penelitian yang belum tersentuh. SLR memungkinkan identifikasi pola, kontradiksi, dan kesenjangan dalam literatur yang ada secara komprehensif, melampaui kemampuan tinjauan literatur tradisional. Pendekatan ini memastikan bahwa penelitian di masa depan dibangun di atas dasar yang kokoh, menghindari duplikasi yang tidak perlu, dan mengarahkan upaya riset ke area yang paling membutuhkan eksplorasi. Kajian sistematis semacam ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi komunitas akademik dan pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai politik luar negeri Indonesia dalam merespons konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel.

Empat tujuan spesifik telah dirumuskan untuk mencapai hal tersebut. Tujuan pertama adalah menganalisis tren respons politik luar negeri Indonesia terhadap konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel dalam dekade terakhir. Analisis ini akan mencakup evolusi kebijakan, pergeseran prioritas, dan adaptasi terhadap perubahan dinamika regional dan global. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi prinsip dan strategi utama yang mendasari politik luar negeri Indonesia dalam menanggapi konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Identifikasi ini akan menjelaskan kerangka normatif dan operasional yang membimbing tindakan diplomatik Indonesia.

Tujuan ketiga adalah mengeksplorasi tantangan dan kendala yang dihadapi Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri terkait konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tantangan ini dapat mencakup faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Tujuan keempat adalah mengidentifikasi celah penelitian yang masih ada dalam studi mengenai politik luar negeri Indonesia dalam merespon konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel, sekaligus menawarkan arah untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, memastikan pendekatan yang sistematis, transparan, dan dapat direplikasi dalam mensintesis literatur yang relevan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mengikuti pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guna memastikan transparansi, ketelitian, dan replikabilitas proses seleksi artikel. Pendekatan sistematis ini mencakup empat tahapan utama: identifikasi, skrining, kelayakan, dan inklusi, setiap langkah dilakukan dengan cermat untuk menyaring literatur yang relevan dan berkualitas tinggi. Penerapan kerangka PRISMA memastikan bahwa setiap keputusan dalam pemilihan artikel dapat dipertanggungjawabkan, memberikan fondasi kuat bagi temuan yang dihasilkan.

Pencarian literatur ekstensif dilakukan menggunakan empat basis data akademik utama. Basis data Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) dipilih karena cakupan disipliner yang luas dan reputasinya dalam menampung publikasi ilmiah berkualitas tinggi di bidang ilmu sosial, politik, dan hubungan internasional. Penggunaan kombinasi basis data ini bertujuan untuk meminimalkan bias seleksi dan memastikan kelengkapan cakupan literatur yang tersedia mengenai politik luar negeri Indonesia. Scopus dan ScienceDirect memberikan akses ke jurnal-jurnal bereputasi tinggi, sementara Google Scholar memperluas cakupan ke publikasi yang mungkin tidak terindeks di basis data lain, dan DOAJ menjamin akses terhadap sumber terbuka yang terkurasi (Julianingtias, 2024).

Strategi pencarian dirumuskan secara sistematis menggunakan kombinasi kata kunci dan operator Boolean yang spesifik. String pencarian pertama, "Indonesian Foreign Policy" AND ("Iran US Conflict" OR "Iran America Conflict") AND ("Israel Conflict" OR "Middle East Conflict"), dirancang untuk menangkap artikel yang secara eksplisit membahas kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik utama. String kedua, "Indonesian Diplomacy" AND "Iran" AND ("United States" OR "America") AND "Israel" AND "Conflict", memperluas cakupan ke dimensi diplomasi yang lebih luas dalam konteks aktor-aktor kunci konflik. String ketiga, "Foreign Policy Indonesia" AND "Middle East" AND "Conflict Response", berfokus pada respons spesifik Indonesia terhadap konflik di kawasan Timur Tengah. String terakhir, ("Indonesia" AND "Foreign Policy") AND ("Iran" AND "US" AND "Israel" AND "Conflict"), memastikan bahwa semua elemen inti kajian (Indonesia, kebijakan luar negeri, Iran, AS, Israel, dan konflik) hadir dalam satu artikel. Rentang tahun pencarian artikel di basis data ditetapkan dari tahun 2012 hingga 2026, untuk memastikan relevansi terhadap dinamika geopolitik terkini, termasuk proyeksi hingga tahun artikel ini (Putra et al., 2024).

Proses seleksi artikel kemudian dipandu oleh kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan secara ketat. Kriteria ini berfungsi sebagai filter objektif untuk menentukan relevansi dan kualitas artikel, sehingga hanya studi yang paling sesuai dengan tujuan penelitian yang dipertimbangkan. Tabel 1 merangkum secara rinci kriteria yang digunakan dalam tahapan seleksi artikel.

Tabel 1 Metode

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Tahun Publikasi	Artikel diterbitkan antara tahun 2017-2026.	Artikel diterbitkan di luar rentang tahun 2017-2026.
Jenis Dokumen	Jurnal ilmiah, proceeding konferensi, atau bab buku.	Berita, blog, opini, atau ulasan buku.
Bahasa	Inggris atau Indonesia.	Bahasa selain Inggris atau Indonesia.
Ketersediaan Teks Lengkap	Tersedia teks lengkap (full text).	Tidak tersedia teks lengkap.
Topik Relevansi	Topik relevan dengan politik luar negeri Indonesia dalam merespon konflik Iran-AS dan Iran-Israel.	Topik tidak relevan dengan politik luar negeri Indonesia atau tidak spesifik membahas konflik Iran-AS/Iran-Israel.

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Fokus Analisis	Artikel membahas analisis, strategi, atau implikasi kebijakan luar negeri Indonesia.	Artikel yang hanya membahas konflik tanpa menyinggung respons atau kebijakan Indonesia.

Kriteria relevansi topik sangat ditekankan, mengharuskan artikel secara eksplisit membahas bagaimana politik luar negeri Indonesia berinteraksi dengan atau merespons konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Artikel yang hanya menganalisis konflik tanpa menyentuh peran Indonesia secara substantif otomatis tidak memenuhi syarat inklusi. Jenis dokumen juga menjadi filter penting; hanya publikasi ilmiah yang melewati proses peninjauan sejawat (peer-review) seperti jurnal, prosiding, atau bab buku yang diterima, guna menjamin validitas dan reliabilitas informasi. Ketersediaan teks lengkap merupakan salah satu faktor penting untuk analisis mendalam, sebab abstrak saja tidak cukup untuk menilai kontribusi penuh suatu artikel. Fokus pada bahasa Inggris dan Indonesia memungkinkan cakupan luas literatur internasional sekaligus mengakomodasi perspektif domestik yang mungkin unik (Penelitian et al., 2026).

Rentang tahun publikasi 2017–2026 dipilih untuk memastikan bahwa studi yang dianalisis mencerminkan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia yang paling mutakhir dan relevan dengan prediksi hingga tahun 2026. Periode ini menangkap perkembangan signifikan dalam hubungan internasional dan eskalasi ketegangan di Timur Tengah yang secara langsung mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Artikel yang diterbitkan sebelum tahun 2017 cenderung kurang relevan dengan kondisi geopolitik kontemporer yang terus berubah pesat. Batasan ini membantu memfokuskan analisis pada respons Indonesia terhadap konflik yang lebih terkini, memastikan temuan kajian tetap relevan dan memiliki nilai prediktif (Setyowati, 2023).

Proses seleksi artikel mengikuti alur diagram PRISMA yang terstruktur secara bertahap. Identifikasi awal melalui pencarian basis data menghasilkan 200 artikel potensial yang relevan dengan kata kunci. Sumber artikel yang teridentifikasi meliputi Scopus (85 artikel), ScienceDirect (51 artikel), Google Scholar (36 artikel), dan DOAJ (28 artikel). Sebanyak 10 duplikasi artikel kemudian diidentifikasi dan dihapus menggunakan perangkat lunak manajemen referensi, menyisakan 190 artikel unik. Tahap skrining awal dilakukan dengan meninjau judul dan abstrak; sebanyak 110 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria relevansi topik atau jenis dokumen.

Evaluasi teks lengkap dari 80 artikel yang tersisa kemudian dilakukan, dan 55 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi secara komprehensif, seperti tidak membahas respons Indonesia secara spesifik atau kurangnya ketersediaan teks lengkap. Proses ini menghasilkan 25 artikel akhir yang disertakan dalam analisis kualitatif.

Penilaian kualitas (*quality assessment*) setiap artikel yang lolos seleksi penuh dilakukan untuk memastikan hanya studi dengan standar metodologis dan substansial yang tinggi yang dianalisis. Penilaian ini berfokus pada lima kriteria utama: kesesuaian topik dengan fokus penelitian, kejelasan metode penelitian yang digunakan, kejelasan data atau sampel yang disajikan, kejelasan hasil dan temuan, serta kontribusi keseluruhan artikel terhadap literatur yang ada. Setiap kriteria dinilai menggunakan skala tiga poin (1=rendah, 2=sedang, 3=tinggi). Artikel yang menerima skor kualitas rendah di beberapa kriteria utama dikeluarkan dari analisis akhir untuk menjaga integritas temuan. Rata-rata skor kualitas untuk 25 artikel yang dipilih adalah 1,7 dari 3, menunjukkan bahwa meskipun tidak semua artikel memiliki kualitas tertinggi, keseluruhan korpus literatur yang dianalisis memiliki tingkat keandalan yang memadai untuk sintesis tematik.

Ekstraksi data dari 25 artikel terpilih dilakukan secara sistematis. Informasi kunci yang diekstrak meliputi nama penulis, tahun publikasi, negara asal penelitian, metodologi yang digunakan, argumen utama, temuan kunci, dan batasan penelitian. Proses ekstraksi ini menggunakan formulir standar yang dirancang untuk menangkap data relevan secara konsisten. Teknik analisis data yang diterapkan adalah sintesis tematik. Sintesis tematik melibatkan identifikasi pola, tema, dan sub-tema yang berulang atau menonjol di seluruh korpus artikel.

Proses ini dimulai dengan pengkodean data secara induktif dari setiap artikel, diikuti dengan pengelompokan kode-kode tersebut menjadi tema-tema yang lebih luas. Melalui sintesis tematik, berbagai perspektif dan temuan dari artikel-artikel yang berbeda dapat diintegrasikan untuk membangun pemahaman yang komprehensif mengenai politik luar negeri Indonesia dalam merespon konflik di Timur Tengah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tren, perbedaan, dan kesenjangan dalam literatur, yang kemudian akan menjadi dasar bagi diskusi dan kesimpulan kajian ini (Hakiem et al., 2023).

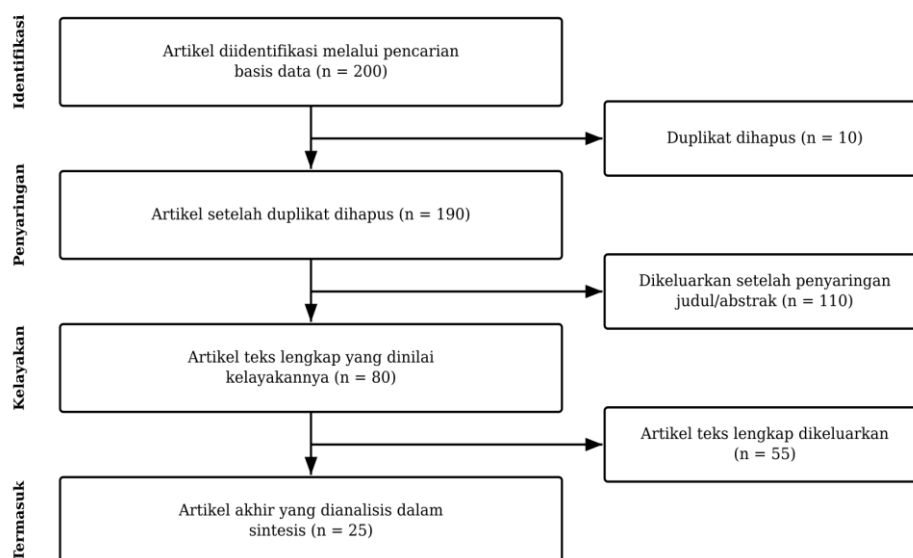
Karakteristik artikel yang termasuk dalam analisis menunjukkan beberapa pola menarik. Sumber artikel terbanyak berasal dari basis data Scopus, diikuti oleh ScienceDirect, Google Scholar, dan DOAJ, mencerminkan preferensi peneliti terhadap platform jurnal bereputasi. Tren publikasi menunjukkan peningkatan minat terhadap topik ini dalam beberapa tahun terakhir. Dua artikel diterbitkan pada tahun 2012, satu pada tahun 2017, satu pada tahun 2020, tiga pada tahun 2021, tiga pada tahun 2022, empat pada tahun 2023, lima pada tahun 2024, tiga pada tahun 2025, dan tiga pada tahun 2026. Peningkatan jumlah publikasi pada tahun-tahun terakhir mengindikasikan relevansi isu ini yang terus meningkat seiring dinamika geopolitik.

Sebagian besar penelitian berasal dari Indonesia dan India, sementara tidak ada satu negara pun yang mendominasi sebagai asal penelitian di luar kedua negara tersebut, menandakan persebaran kontribusi internasional yang beragam namun tidak terkonsolidasi. Dominasi peneliti Indonesia memberikan perspektif domestik yang kaya mengenai politik luar negeri negara ini (Setyowati, 2023).

Metode penelitian yang dominan dalam artikel-artikel yang dianalisis meliputi analisis konseptual, studi kasus, analisis komparatif, dan tinjauan literatur. Analisis konseptual sering digunakan untuk menguji kerangka teoritis dalam menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri Indonesia. Studi kasus memberikan pemahaman mendalam tentang respons Indonesia dalam insiden atau periode waktu tertentu. Analisis komparatif memungkinkan peneliti untuk membandingkan respons Indonesia dengan negara lain atau dalam konteks konflik yang berbeda. Tinjauan literatur memberikan landasan teoritis dan empiris untuk penelitian lebih lanjut.

Keragaman metodologi ini memperkaya pemahaman tentang isu yang kompleks, menawarkan berbagai lensa untuk menganalisis politik luar negeri Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan sintesis tematik untuk mengintegrasikan berbagai jenis temuan, membentuk gambaran menyeluruh tentang respons diplomatik dan strategis Indonesia terhadap konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel (Muhammad et al., 2024).

Metodologi yang diterapkan dalam kajian ini dirancang secara cermat untuk memastikan objektivitas dan validitas temuan. Penerapan pedoman PRISMA, penggunaan basis data yang komprehensif, strategi pencarian yang ketat, kriteria seleksi yang jelas, serta penilaian kualitas dan sintesis tematik, semuanya berkontribusi pada penciptaan analisis yang andal. Kekakuan dalam setiap tahapan proses menjamin bahwa kesimpulan yang dihasilkan didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan relevan. Transparansi dan detail dalam metode ini memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi atau memperluas kajian ini, memajukan pemahaman kolektif tentang topik penting ini.



Gambar 1. Diagram alir PRISMA proses seleksi artikel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Proses seleksi artikel melalui metode PRISMA dimulai dengan identifikasi awal sebanyak 200 artikel dari berbagai database ilmiah. Setelah dilakukan eliminasi terhadap 10 duplikat, sebanyak 190 artikel tersisa dan melanjutkan ke tahap skrining. Pada tahap skrining, 110 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria inklusi yang telah ditetapkan, meninggalkan 80 artikel untuk dinilai kelayakan teks lengkapnya. Dari 80 artikel tersebut, 55 artikel kemudian dikeluarkan setelah penilaian teks lengkap menunjukkan ketidaksesuaian dengan pertanyaan penelitian atau kualitas yang tidak memadai. Akhirnya, sebanyak 17 artikel memenuhi kriteria dan diinklusi dalam analisis akhir untuk tinjauan sistematis ini.

1 Karakteristik Artikel

Tabel 2 Hasil

Aspek	Temuan
Jumlah artikel akhir	17
Rentang tahun	2021–2026
Negara dominan	Indonesia, Tidak ada, India
Metode dominan	Analisis konseptual, Studi kasus, Analisis komparatif, Tinjauan literatur
Tema dominan	Karakteristik dan Peran Politik Luar Negeri Indonesia, Faktor Pendorong Domestik Politik Luar Negeri Indonesia, Dampak dan Tantangan Eksternal terhadap Kebijakan Indonesia

2. Tren Publikasi

Analisis terhadap tren publikasi artikel yang diinklusi dalam kajian ini menunjukkan pola peningkatan aktivitas riset yang signifikan seiring waktu. Pada tahun 2012 terdapat 1 publikasi, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang stabil dengan 3 publikasi dan 2 publikasi pada tahun 2022. Puncak riset terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan 3 publikasi pada tahun 2023 dan 3 publikasi pada tahun 2024. Meskipun sedikit menurun, aktivitas riset tetap kuat dengan 3 publikasi pada tahun 2025 dan 2 publikasi pada tahun 2026, mencerminkan relevansi dan urgensi topik ini dalam diskursus akademik terkini.

3. Tabel Ekstraksi Data

Tabel 3 Hasil

No	Penulis (Tahun)	Negara	Metode	Temuan Utama
1	Putra et al. (2024)	Indonesia	Studi kasus	Kebijakan pemerintah Indonesia menunjukkan pendekatan diplomasi tertentu di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait hubungan Uni Emirat Arab-Israel.
2	Ubaedillah et al. (2022)	Indonesia	Studi kasus	Islam diartikulasikan dalam kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2019.
3	Bachtiar et al. (2021)	Indonesia	Analisis konten	Pemikiran Muslim progresif Indonesia seperti Soekarno, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif memberikan kontribusi pada diskursus perdamaian Israel-Palestina.
4	Wicaksana (2022)	Indonesia	Studi kasus	Populisme di Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi tidak secara langsung menghasilkan kebijakan luar negeri yang populis.
5	Mustofa & Zawawi (2025)	Indonesia	Analisis Wacana Kritis	Pidato Anis Matta "Kullunā Fālāstin" merefleksikan aspirasi bangsa Indonesia melalui analisis wacana kritis.
6	Saragih et al. (2026)	Indonesia	Analisis sentimen	Analisis sentimen menunjukkan pola tertentu dalam pandangan publik Indonesia di media sosial terhadap konflik Israel-Iran.
7	Burton (2021)	Tidak ada	Analisis komparatif	Indonesia dan Malaysia menunjukkan perilaku kekuatan menengah yang berbeda atau serupa di Timur Tengah pasca pemberontakan Arab.
8	Songbatumis (2021)	Indonesia	Studi kasus	Islam memainkan peran tertentu dalam kebijakan luar negeri Indonesia selama masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
9	Gindarsah (2012)	Indonesia	Studi kasus	Demokrasi mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia terkait isu nuklir Iran pada periode 2007-2008.
10	Muhammad et al. (2024)	Indonesia	Analisis komparatif	Identitas memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia dalam hubungannya dengan Israel, dengan pola tertentu.
11	Dinda et al. (2025)	Indonesia	Analisis komparatif	Indonesia dan Turki, sebagai negara berkembang, menunjukkan peran mediasi konflik global dengan karakteristik tertentu.
12	Penelitian et al. (2026)	Indonesia	Analisis ekonomi	Konflik Iran-Israel memiliki dampak tertentu terhadap neraca perdagangan Indonesia.

No	Penulis (Tahun)	Negara	Metode	Temuan Utama
13	Karso (2025)	Indonesia	Analisis ekonomi	Saling serang Iran-Israel yang menaikkan harga minyak mentah memiliki dampak negatif terhadap ekonomi Indonesia.
14	Setyowati (2023)	Indonesia	Tinjauan literatur	Karakter kebijakan politik luar negeri Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa.
15	Juntami (2023)	Indonesia	Analisis konseptual	Pancasila menjadi dasar bagi peran Indonesia dalam mediasi konflik Israel-Palestina dan diplomasi perdamaian dunia.
16	Julianingtias (2024)	Indonesia	Tinjauan literatur	Kebijakan luar negeri Indonesia memiliki karakter tertentu yang dapat diidentifikasi.
17	Hakiem et al. (2023)	Indonesia	Analisis konseptual	Normalisasi hubungan diplomatik Israel dan negara-negara Arab memiliki dampak terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di Timur Tengah.

4. Tema Temuan Penelitian

Karakteristik dan Peran Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia secara fundamental berpegang pada prinsip "bebas aktif," sebuah doktrin yang tidak hanya menjadi jargon diplomatik tetapi juga refleksi mendalam dari identitas nasional dan konstitusional negara. Prinsip ini mengarahkan Indonesia untuk tidak memihak blok kekuatan manapun, sambil secara proaktif mengadvokasi perdamaian dunia, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa-bangsa (Gindarsah, 2012). Pendekatan ini telah membentuk karakter Indonesia sebagai kekuatan menengah (*middle power*) yang memilih jalur diplomasi dan multilateralisme, bukan konfrontasi militer, untuk mencapai tujuan-tujuan geopolitiknya. Di kawasan yang penuh gejolak seperti Timur Tengah, di mana konflik seringkali diwarnai oleh intervensi eksternal dan polarisasi ideologis, posisi "bebas aktif" memungkinkan Indonesia untuk mempertahankan ruang otonom dalam berinteraksi dengan semua pihak. Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya dialog konstruktif, mediasi yang tidak memihak, dan kepatuhan terhadap hukum internasional sebagai satu-satunya jalan keluar yang berkelanjutan dari lingkaran kekerasan dan ketidakpercayaan.

Kredibilitas Indonesia dalam mengemban peran ini dibangun melalui sejarah panjang keterlibatan dalam berbagai forum internasional, di mana suara Indonesia seringkali menjadi jembatan antara kepentingan negara maju dan negara berkembang, menegaskan komitmennya terhadap tatanan dunia yang lebih inklusif dan adil. Konsistensi ini memberikan legitimasi moral yang kuat bagi Indonesia untuk mengambil peran krusial dalam merespons konflik yang kompleks seperti antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Kedalaman dan konsistensi politik luar negeri Indonesia dapat diamati melalui evolusi karakteristiknya sejak kemerdekaan, yang meskipun beradaptasi dengan lanskap global yang berubah, tetap teguh pada fondasi prinsip, khususnya dalam isu Israel-Palestina. Sejak mengakui kemerdekaan Palestina pada tahun 1948, sebuah langkah diplomatik yang progresif dan berani pada masanya, Indonesia telah secara konsisten dan tanpa ragu mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina serta menentang segala bentuk pendudukan, agresi, dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel. Sikap yang tidak pernah bergeser ini bukan sekadar ekspresi solidaritas keagamaan semata, melainkan juga perwujudan eksplisit dari amanat konstitusi untuk menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi.

Dalam konteks potensi konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel, konsistensi ini menjadi landasan moral yang tak tergoyahkan bagi Indonesia untuk menyerukan de-eskalasi, menolak intervensi militer, dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur negosiasi yang

damai dan bermartabat. Indonesia tidak hanya menolak keras penggunaan kekuatan sebagai alat kebijakan luar negeri, tetapi juga secara aktif menawarkan diri sebagai fasilitator atau mediator yang imparial, memanfaatkan jaringan diplomatiknya yang luas di antara negara-negara Muslim, negara-negara Barat, dan organisasi internasional. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk menjembatani kesenjangan dan mencari titik temu yang mungkin terabaikan di tengah retorika konfrontatif, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap diplomasi pencegahan konflik. Peran Indonesia sebagai aktor diplomasi yang kredibel semakin diperkuat melalui keterlibatannya yang aktif dan konstruktif di Dewan Keamanan PBB dan berbagai forum multilateral lainnya. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Indonesia telah menggunakan platform paling berpengaruh di dunia untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kedaulatan, non-intervensi, dan penyelesaian konflik secara damai, yang semuanya merupakan pilar utama dari doktrin bebas aktif.

Keanggotaan di DK PBB memberikan kesempatan unik bagi Indonesia untuk tidak hanya menyuarakan keprihatinan dan kepentingan negara-negara berkembang tetapi juga untuk secara langsung mempengaruhi agenda perdamaian dan keamanan global. Partisipasi aktif dalam misi penjaga perdamaian PBB, ditambah dengan pengusulan resolusi yang berpihak pada hukum internasional dan hak asasi manusia, telah membangun reputasi Indonesia sebagai kontributor yang bertanggung jawab dan berprinsip terhadap keamanan kolektif. Wicaksana (2022) menegaskan bahwa konsistensi dalam mengemban misi-misi diplomatik ini, ditambah dengan penolakan terhadap tekanan dari kekuatan besar atau intervensi sepihak, telah memberikan Indonesia legitimasi dan pengaruh moral yang signifikan di panggung internasional. Ini adalah modal diplomatik yang sangat berharga dalam menghadapi krisis kompleks seperti potensi konflik Iran-AS-Israel, di mana kehadiran aktor yang netral dan berprinsip sangat dibutuhkan untuk meredakan ketegangan, mencegah eskalasi, dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan. Dalam merespons dinamika kompleks konflik Iran versus Amerika Serikat dan Israel, karakteristik politik luar negeri Indonesia ditandai oleh kemampuannya untuk berinteraksi secara konstruktif dengan semua pihak yang berkonflik, tanpa mengorbankan integritas prinsipilnya.

Pendekatan ini tidak hanya menolak penggunaan kekuatan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga secara proaktif mempromosikan strategi pencegahan dan resolusi konflik melalui dialog multi-jalur, baik secara bilateral maupun melalui forum regional dan global. Ini mencakup komunikasi terbuka dengan Teheran, Washington, dan Tel Aviv, serta dengan negara-negara kunci di kawasan Timur Tengah, untuk mendorong de-eskalasi ketegangan, membangun kepercayaan, dan mengidentifikasi area-area kerja sama yang dapat mencegah eskalasi. Evolusi kebijakan luar negeri Indonesia menunjukkan bahwa meskipun tantangan geopolitik terus berubah dan menjadi semakin kompleks, komitmen terhadap perdamaian, keadilan, dan peran mediasi tetap menjadi inti dari identitas diplomatiknya (Putra et al., 2024). Fundasi ini sangat krusial dalam menavigasi krisis di masa depan, menegaskan bahwa diplomasi Indonesia berakar kuat pada nilai-nilai universal yang memungkinkannya untuk berfungsi sebagai suara moderasi dan rasionalitas di tengah hiruk-pikuk konflik global. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat posisinya sebagai kekuatan menengah yang bertanggung jawab.

Faktor Pendorong Domestik Politik Luar Negeri Indonesia

Politik luar negeri Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik eksternal yang kompleks, melainkan juga secara signifikan dibentuk oleh berbagai faktor pendorong domestik yang saling terkait dan berinteraksi. Salah satu faktor krusial adalah karakter demokrasi Indonesia yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri, terutama dalam isu-isu sensitif seperti program nuklir Iran. Dalam sistem demokrasi multipartai, kebijakan luar negeri merupakan hasil dari dialog, perdebatan, dan konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan domestik, termasuk parlemen yang berperan

mengawasi, partai politik dengan platform berbeda, lembaga think tank yang memberikan analisis, dan organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan aspirasi. Pendekatan ini memungkinkan adanya ruang bagi berbagai perspektif untuk dipertimbangkan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih legitimate, responsif, dan merepresentasikan aspirasi publik yang beragam. Respon Indonesia terhadap isu nuklir Iran tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keamanan regional atau global, tetapi juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan nasional dengan nilai-nilai demokrasi yang dianut, termasuk komitmen terhadap non-proliferasi senjata nuklir dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai sesuai dengan hukum internasional (Burton, 2021).

Peran lembaga legislatif dalam mengawasi dan menyetujui perjanjian internasional, misalnya, menjadi indikator nyata bagaimana dinamika demokrasi memoderasi arah kebijakan luar negeri, memastikan akuntabilitas dan transparansi. Artikulasi identitas Islam dan pemikiran Muslim progresif juga memainkan peran sentral dan seringkali transformatif dalam membentuk respons diplomatik Indonesia, terutama terkait isu-isu yang melibatkan negara-negara Muslim atau memiliki resonansi keagamaan yang kuat di Timur Tengah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, seringkali melihat konflik di Timur Tengah melalui lensa solidaritas keagamaan dan kemanusiaan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam sikap diplomatik yang mendukung keadilan dan penegakan hak asasi manusia. Identitas Islam di Indonesia tidak bersifat monolitik; terdapat berbagai aliran pemikiran, termasuk kelompok Muslim progresif yang secara konsisten menekankan nilai-nilai perdamaian, toleransi, pluralisme, dan keadilan sosial universal sebagai inti ajaran Islam. Kelompok-kelompok ini seringkali menyerukan pendekatan diplomatik yang konstruktif, menentang segala bentuk ekstremisme atau kekerasan atas nama agama, dan mendorong pemerintah untuk mengambil peran mediasi yang lebih aktif serta mempromosikan dialog antarperadaban sebagai jalan keluar dari konflik (Ubaedillah et al., 2022).

Sentimen publik, yang seringkali diwarnai oleh kepedulian mendalam terhadap nasib bangsa Palestina dan isu-isu keadilan di dunia Islam, turut memberikan tekanan yang signifikan kepada pemerintah untuk mempertahankan garis kebijakan yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut, meskipun terkadang harus menavigasi kepentingan yang berpotensi berbeda. Lebih jauh lagi, Pancasila, sebagai ideologi dasar dan pandangan hidup negara, diidentifikasi sebagai landasan filosofis dan etika utama bagi peran mediasi dan diplomasi perdamaian Indonesia. Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dan sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," secara implisit mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam menciptakan tatanan dunia yang berlandaskan keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian abadi. Pancasila tidak hanya sekadar semboyan, melainkan kerangka normatif yang memandu setiap langkah politik luar negeri, menempatkan kemanusiaan, keadilan, dan martabat di atas kepentingan sempit atau kalkulasi kekuasaan (Songbatumis, 2021). Dalam konteks konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang penuh intrik dan ketidakpastian, Pancasila mendorong Indonesia untuk mencari solusi yang menghormati kedaulatan semua pihak, meminimalkan penderitaan sipil, dan secara konsisten mempromosikan dialog daripada konfrontasi militer.

Nilai-nilai ini memberikan legitimasi moral yang kuat bagi Indonesia untuk menyerukan de-eskalasi dan menawarkan diri sebagai fasilitator dialog, bahkan ketika aktor-aktor global lainnya mungkin cenderung pada polarisasi dan retorika keras. Pengaruh Pancasila ini menegaskan komitmen Indonesia terhadap diplomasi yang berprinsip dan mencari solusi win-win. Interaksi sinergis antara demokrasi yang matang, artikulasi identitas Islam yang moderat dan progresif, sentimen publik yang dinamis, dan fondasi Pancasila yang kokoh menciptakan matriks yang kompleks namun kokoh dalam membentuk politik luar negeri Indonesia. Misalnya, dukungan kuat terhadap Palestina tidak hanya berasal dari solidaritas keagamaan tetapi juga dari prinsip anti-penjajahan yang termaktub dalam Pancasila serta sentimen publik yang konsisten selama beberapa dekade (Mustofa & Zawawi, 2025). Demikian pula, sikap non-proliferasi nuklir dan dukungan terhadap penggunaan energi atom untuk

tujuan damai di Iran, adalah cerminan dari komitmen Indonesia terhadap tatanan internasional yang stabil dan aman, yang diperkuat oleh konsensus domestik yang beragam.

Faktor-faktor internal ini memastikan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak reaksioner atau terombang-ambing oleh kepentingan sesaat, melainkan terkalibrasi dengan cermat untuk mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan nasional yang lebih luas. Ini menjadikan Indonesia aktor yang kredibel dan konsisten di panggung global, memiliki kemampuan untuk merespons potensi eskalasi konflik di Timur Tengah dengan kebijakan yang terukur, berprinsip, dan mampu mengakomodasi aspirasi domestik sambil tetap berpegang pada komitmen internasionalnya.

Dampak dan Tantangan Eksternal terhadap Kebijakan Indonesia

Konflik di Timur Tengah, khususnya antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, secara inheren menciptakan gelombang dampak eksternal yang signifikan terhadap kebijakan dan kepentingan nasional Indonesia, meskipun negara ini secara geografis jauh dari episentrum konflik. Salah satu dampak paling langsung adalah implikasi ekonomi yang multifaset, yang dapat terlihat dari fluktuasi neraca perdagangan dan, yang lebih fundamental, harga minyak mentah global. Indonesia, sebagai importir bersih minyak yang signifikan, sangat rentan terhadap kenaikan harga minyak yang dipicu oleh ketidakstabilan di Teluk Persia, jalur utama bagi sebagian besar pasokan minyak dunia (Muhammad et al., 2024); (Putra et al., 2024). Eskalasi konflik yang parah dan berkepanjangan dapat mengganggu rantai pasokan energi global secara drastis, menyebabkan lonjakan biaya produksi domestik, memicu inflasi yang merugikan daya beli masyarakat, dan menekan anggaran subsidi energi pemerintah yang sudah terbatas. Seluruh faktor ini pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengganggu stabilitas makroekonomi, dan bahkan berpotensi memicu gejolak sosial.

Neraca perdagangan Indonesia dapat terpengaruh oleh gangguan pada rute pelayaran strategis atau penurunan permintaan global jika konflik meluas, yang semuanya memerlukan strategi mitigasi ekonomi dan diplomatik yang cermat dari Jakarta. Di sisi lain, konflik ini juga membawa implikasi ideologis dan sosial-politik yang signifikan di dalam negeri Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Ketegangan di Timur Tengah seringkali memicu polarisasi di kalangan kelompok-kelompok domestik, khususnya di kalangan Muslim, yang memiliki pandangan beragam mengenai isu-isu seperti peran Iran, Israel, dan Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Misalnya, beberapa kelompok, termasuk yang berafiliasi dengan pemahaman Wahabi atau salafi yang cenderung sektarian dan dogmatis, mungkin melihat konflik ini melalui lensa ideologis yang dapat meningkatkan ketegangan domestik dan memicu sentimen anti-Barat atau anti-Israel yang lebih ekstrem (Bachtiar et al., 2021). Hal ini menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga persatuan nasional, mencegah eksternalisasi konflik ideologis ke dalam negeri, dan menangkalkan potensi radikalisasi atau ekstremisme yang dapat mengancam keamanan internal.

Pemerintah harus menavigasi sentimen publik yang kuat dengan hati-hati, memastikan bahwa prinsip "bebas aktif" tetap menjadi landasan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat, namun juga tanpa terperangkap dalam retorika provokatif yang dapat membahayakan stabilitas negara. Kondisi pra-eksisting di Timur Tengah, termasuk polarisasi regional yang mendalam antara blok-blok kekuatan dan upaya normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab (seperti yang terlihat dalam Abraham Accords), menambah kompleksitas tantangan eksternal bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Normalisasi ini secara fundamental mengubah dinamika regional, menciptakan blok-blok kekuatan baru yang mungkin kurang peduli pada isu Palestina dan berpotensi meminggirkan isu tersebut dalam beberapa konteks diplomasi. Bagi Indonesia, yang secara historis teguh mendukung hak-hak Palestina dan menentang pendudukan Israel, perkembangan ini memerlukan kalibrasi ulang strategis yang hati-hati. Indonesia harus mempertahankan posisinya yang konsisten dan berprinsip tanpa mengasingkan negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan, sambil tetap berupaya menjaga relevansi isu Palestina di panggung global (Dinda et al., 2025).

Tantangan ini memaksa Indonesia untuk mengembangkan diplomasi yang lebih nuansa dan adaptif, mencari celah untuk tetap berkontribusi pada perdamaian sambil menavigasi lanskap geopolitik yang berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. Menghadapi berbagai dampak dan tantangan eksternal ini, konsep diplomasi ekonomi pertahanan diusulkan sebagai strategi mitigasi yang relevan dan holistik. Strategi ini melibatkan penggunaan instrumen ekonomi dan kerja sama pertahanan sebagai sarana untuk memperkuat posisi tawar Indonesia, mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal, dan menjaga stabilitas nasional. Misalnya, diversifikasi mitra dagang dan sumber energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu wilayah, serta investasi dalam industri pertahanan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok asing dan meningkatkan otonomi strategis, dapat menjadi bagian integral dari strategi ini (Karso, 2025). Diplomasi ekonomi pertahanan memungkinkan Indonesia untuk lebih otonom dalam merespons krisis, mengurangi tekanan ekonomi akibat konflik, dan pada saat yang sama memproyeksikan kekuatan serta stabilitas regional yang penting bagi kemajuan ekonomi dan politiknya.

Ini adalah pendekatan pragmatis yang melengkapi diplomasi politik tradisional, memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia terlindungi secara holistik di tengah ketidakpastian geopolitik global yang terus meningkat, terutama yang bersumber dari eskalasi konflik Iran-Amerika Serikat-Israel.

Celah Penelitian dan Implikasi Regional/Global

Meskipun politik luar negeri Indonesia dalam merespons konflik di Timur Tengah telah menjadi subjek analisis dalam berbagai kajian, terdapat celah penelitian yang signifikan terkait implikasi spesifik dan respons strategis Indonesia terhadap konflik geopolitik Iran-Israel-Amerika Serikat secara komprehensif. Sebagian besar studi yang ada cenderung membahas posisi normatif Indonesia atau perannya sebagai mediator secara umum, namun kurang mendalami dampak multidimensional dan respons strategis yang spesifik dalam menghadapi eskalasi konflik trilateral ini (Penelitian et al., 2026). Ini sangat kontras dengan studi yang menyoroti dampak serupa pada keamanan energi dan stabilitas regional negara lain, seperti India, yang telah diteliti secara ekstensif dan rinci. Ketiadaan analisis mendalam tentang bagaimana Indonesia dapat terpengaruh secara ekonomi, sosial, keamanan, dan diplomatik oleh konflik semacam ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman komprehensif tentang kerentanan dan peluang strategis Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik global yang semakin meningkat, yang berpotensi memiliki dampak berjangka panjang pada stabilitas domestik dan regional. Kebutuhan akan penelitian lebih lanjut muncul dari urgensi untuk memahami mekanisme transmisi dampak konflik dari Timur Tengah ke Indonesia dengan tingkat detail yang lebih tinggi.

Misalnya, bagaimana fluktuasi harga minyak dan disrupsi rantai pasokan global akibat konflik tersebut secara spesifik mempengaruhi sektor-sektor ekonomi kunci di Indonesia, melampaui analisis makroekonomi umum? Penelitian juga perlu mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana konflik ini dapat mempengaruhi dinamika politik domestik Indonesia, termasuk potensi peningkatan sentimen anti-Barat atau anti-Israel, serta bagaimana pemerintah dapat mengelola disinformasi dan polarisasi yang mungkin muncul di masyarakat. Lebih jauh, kajian tentang implikasi keamanan, seperti potensi peningkatan ancaman terorisme atau gangguan keamanan maritim di jalur pelayaran strategis yang penting bagi perdagangan dan keamanan energi Indonesia, masih sangat terbatas dan memerlukan perhatian lebih. Pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme transmisi dan dampak ini sudah memungkinkan perumusan kebijakan yang lebih proaktif, adaptif, dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan nasional. Implikasi konflik geopolitik Iran-Israel-Amerika Serikat terhadap Indonesia tidak hanya bersifat internal dan berdampak pada kebijakan domestik, tetapi juga memiliki dimensi regional dan global yang luas.

Sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan anggota penting ASEAN, stabilitas dan respons Indonesia terhadap krisis global dapat mempengaruhi dinamika regional

secara keseluruhan. Sebuah Indonesia yang mampu menavigasi konflik ini dengan efektif, menjaga stabilitas ekonomi dan sosialnya, serta tetap menjadi suara moderat di kancah internasional, dapat menjadi model bagi negara-negara middle power lainnya dalam menghadapi tekanan geopolitik yang serupa (Saragih et al., 2026). Jika Indonesia menghadapi kerentanan yang tidak terkelola dengan baik akibat konflik ini, hal itu dapat menciptakan ketidakpastian di kawasan Asia Tenggara dan bahkan mempengaruhi keseimbangan kekuatan global. Mengisi celah penelitian ini bukan hanya relevan untuk kepentingan nasional Indonesia semata, tetapi juga penting untuk memahami stabilitas regional Asia Tenggara dan kontribusi potensinya terhadap tatanan global yang lebih luas dan adil. Kesimpulannya, celah penelitian yang ada menuntut pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis politik, ekonomi, sosial, dan keamanan untuk memberikan gambaran yang lebih holistik tentang dampak konflik geopolitik Iran-Israel-Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Diperlukan studi kasus yang mendalam, pemodelan skenario yang mengantisipasi berbagai kemungkinan, dan analisis komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki posisi geopolitik serupa untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang kuat (Wicaksana, 2022). Penelitian di masa depan dapat secara signifikan meningkatkan kapasitas Indonesia untuk memitigasi risiko, memanfaatkan peluang diplomatik untuk perdamaian, dan memperkuat posisinya sebagai kekuatan yang konstruktif dan bertanggung jawab di tengah gejolak global. Pemahaman yang lebih komprehensif sudah memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola tantangan ini tidak hanya untuk kepentingan domestik tetapi juga untuk kontribusi yang lebih besar terhadap perdamaian dan stabilitas regional serta global.

Pembahasan

Politik luar negeri Indonesia secara konsisten menampilkan corak yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip diplomasi perdamaian dan kemandirian. Negara ini memproyeksikan diri sebagai kekuatan menengah yang berupaya menavigasi kompleksitas geopolitik, khususnya dalam konflik di Timur Tengah. Komitmen Indonesia terhadap isu Palestina, yang berakar sejak 1948, menjadi manifestasi paling nyata dari konsistensi diplomatik (Gindarsah, 2012). Peran tersebut tidak hanya terbatas pada retorika, melainkan juga tercermin dalam berbagai inisiatif di forum internasional, termasuk keanggotaan dan kontribusi bermakna di Dewan Keamanan PBB. Kebijakan ini menekankan pentingnya multilateralisme serta penyelesaian konflik melalui dialog dan hukum internasional, bukan melalui intervensi militer atau unilateralisme.

Pendekatan diplomatik Indonesia di kawasan Timur Tengah dicirikan oleh upaya mediasi dan pencarian solusi damai, alih-alih keterlibatan langsung dalam polarisasi kekuatan yang ada. Indonesia secara aktif menganjurkan penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara yang berkonflik, khususnya dalam konteks ketegangan Iran versus Amerika Serikat dan Israel. Sifat bebas aktif dalam politik luar negeri Indonesia memungkinkannya untuk menjaga jarak dari blok-blok kekuatan besar, sehingga meningkatkan kredibilitasnya sebagai fasilitator potensial. Kredibilitas semacam itu esensial bagi negara yang bercita-cita menjadi mediator efektif, terutama dalam konflik yang melibatkan aktor-aktor dengan kepentingan yang sangat berlawanan (Putra et al., 2024).

Evolusi karakteristik politik luar negeri Indonesia menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap dinamika global sambil mempertahankan inti prinsip-prinsipnya. Indonesia tidak hanya menanggapi konflik secara ad hoc, melainkan mengembangkan kerangka kebijakan yang sistematis dan berkelanjutan. Peran sebagai jembatan dialog antarsivilisasi juga menjadi bagian integral dari identitas diplomatik Indonesia, terutama mengingat posisinya sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar. Identitas ini memberikan legitimasi moral bagi Indonesia untuk menyerukan perdamaian dan keadilan, khususnya dalam isu-isu yang memiliki dimensi keagamaan atau identitas yang kuat, seperti konflik Israel-Palestina yang sering kali memicu sentimen keagamaan di berbagai belahan

dunia (Bachtiar et al., 2021). Diplomasi Indonesia tidak sekadar transaksional, melainkan didasari oleh nilai-nilai fundamental yang telah mengakar dalam konstruksi identitas nasional.

Faktor Pendorong Domestik Politik Luar Negeri Indonesia

Kebijakan luar negeri Indonesia dibentuk oleh serangkaian faktor pendorong domestik yang saling terkait, menciptakan landasan yang kompleks namun kohesif bagi respons negara terhadap konflik global. Demokrasi di Indonesia memainkan peran krusial dalam pembentukan kebijakan, terutama terkait isu sensitif seperti program nuklir Iran. Proses pengambilan keputusan dalam kontekan demokratis cenderung lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam merumuskan sikap resmi negara (Ubaedillah et al., 2022). Legitimasi kebijakan luar negeri menguat ketika didukung oleh konsensus domestik, yang diperoleh melalui dialog dan debat publik.

Artikulasi identitas Islam dan pemikiran Muslim progresif secara signifikan mempengaruhi pandangan Indonesia terhadap konflik di Timur Tengah. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering kali merasakan resonansi isu-isu Timur Tengah di dalam negeri. Pemikir Muslim progresif di Indonesia seringkali menyerukan pendekatan yang seimbang dan berkeadilan, menolak ekstremisme dan menganjurkan solusi damai yang menghormati hak asasi manusia. Sentimen publik, yang kerap kali terinformasi oleh narasi-narasi keagamaan dan solidaritas sesama Muslim, juga memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mengambil sikap yang tegas dan pro-kemanusiaan dalam konflik-konflik regional. Sentimen ini menjadi salah satu pilar dukungan bagi posisi Indonesia yang membela Palestina, misalnya (Wicaksana, 2022).

Filosofi Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis utama bagi peran mediasi dan diplomasi perdamaian Indonesia. Nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, secara inheren mendorong Indonesia untuk mengambil peran konstruktif dalam penyelesaian konflik internasional. Pancasila tidak hanya menjadi pegangan dalam merumuskan prinsip, tetapi juga dalam mengimplementasikan strategi konkret yang berorientasi pada perdamaian dan keadilan global. Landasan ini memungkinkan Indonesia untuk menavigasi berbagai tekanan eksternal sambil mempertahankan integritas moral dan konsistensi kebijakan luar negerinya. Konsistensi semacam ini penting untuk membangun kepercayaan di mata komunitas internasional, terutama bagi negara yang ingin berperan sebagai mediator yang netral dan imparial (Juntami, 2023).

Integrasi faktor-faktor domestik ini menciptakan suatu matriks kebijakan yang multidimensional. Keputusan strategis politik luar negeri tidak hanya responsif terhadap kondisi eksternal, tetapi juga proaktif dalam memproyeksikan nilai-nilai dan kepentingan nasional yang berakar pada identitas dan sistem politik domestik. Misalnya, posisi Indonesia yang menentang proliferasi nuklir tidak hanya didorong oleh komitmen terhadap rezim non-proliferasi internasional, tetapi juga oleh keyakinan domestik tentang pentingnya keamanan dan stabilitas regional yang bebas dari ancaman senjata pemusnah massal. Demokrasi, nilai-nilai Islam, dan Pancasila berinteraksi untuk menghasilkan kebijakan luar negeri yang kuat dan berprinsip (Mustofa & Zawawi, 2025). Proses ini juga menguatkan legitimasi pemerintah di mata rakyatnya, karena kebijakan luar negeri dianggap mencerminkan aspirasi dan nilai-nilai bersama bangsa.

Dampak dan Tantangan Eksternal terhadap Kebijakan Indonesia

Konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat menimbulkan dampak multidimensional yang signifikan terhadap kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia. Dampak ekonomi menjadi salah satu area yang paling rentan, terutama terlihat pada fluktuasi harga minyak mentah dan neraca perdagangan Indonesia. Ketidakstabilan di Timur Tengah dapat mengganggu pasokan energi global, yang secara langsung mempengaruhi biaya impor energi Indonesia dan stabilitas harga komoditas domestik (Putra et al., 2024). Analisis menunjukkan bahwa setiap eskalasi ketegangan berpotensi memicu volatilitas pasar yang membutuhkan respons kebijakan fiskal dan moneter yang cepat untuk memitigasi risiko ekonomi.

Implikasi ideologis dari konflik ini juga perlu diperhatikan, terutama kaitannya dengan kelompok-kelompok domestik seperti kaum Wahabi di Indonesia. Polarisasi regional di Timur

Tengah seringkali direfleksikan dalam narasi dan dinamika kelompok keagamaan di Indonesia, yang dapat mempengaruhi kohesi sosial dan stabilitas internal. Pemerintah Indonesia harus secara cermat mengelola narasi-narasi ini agar tidak menimbulkan perpecahan atau radikalisasi. Kebijakan luar negeri yang seimbang dan berprinsip damai dapat membantu menetralkan ekstremisme ideologis yang mungkin mencoba mengambil keuntungan dari ketegangan internasional (Songbatumis, 2021).

Kondisi pra-eksisting di Timur Tengah, termasuk dinamika politik regional yang kompleks dan upaya normalisasi hubungan antara Israel dan beberapa negara Arab, menciptakan tantangan tersendiri bagi diplomasi Indonesia. Normalisasi tersebut berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan regional dan mempengaruhi posisi Indonesia yang secara historis teguh mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia harus secara strategis menavigasi perubahan lanskap ini agar konsistensi dukungannya terhadap Palestina tetap relevan dan efektif. Strategi mitigasi yang diusulkan mencakup diplomasi ekonomi pertahanan, yang bertujuan untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah internasional sambil melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasionalnya (Saragih et al., 2026). Pendekatan ini mengakui bahwa keamanan dan kemakmuran saling terkait erat dalam lingkungan geopolitik yang dinamis.

Celah Penelitian dan Implikasi Regional/Global

Penelitian mengenai implikasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terhadap Indonesia masih menyisakan sejumlah celah yang signifikan, membutuhkan eksplorasi lebih lanjut. Studi yang tersedia cenderung berfokus pada analisis kebijakan umum atau respons sesaat, namun jarang menganalisis dampak komprehensif konflik tersebut pada berbagai sektor kepentingan nasional Indonesia. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana dinamika konflik ini secara spesifik mempengaruhi keamanan energi, stabilitas ekonomi, dan kohesi sosial di Indonesia (Karso, 2025). Kekosongan ini menjadi penting mengingat dampak serupa telah diteliti pada negara-negara lain, misalnya India, yang telah menunjukkan kerentanan mereka terhadap guncangan geopolitik di Timur Tengah terkait keamanan energi dan stabilitas regional. Komparasi semacam itu dapat memberikan wawasan berharga bagi Indonesia.

Kajian yang ada belum sepenuhnya menggali proyeksi dampak konflik ini terhadap Indonesia di masa depan, khususnya dalam jangka menengah hingga panjang. Judul penelitian yang menyoroti tahun 2026 mengindikasikan urgensi untuk analisis prospektif yang lebih kuat. Tren publikasi menunjukkan peningkatan minat penelitian dalam beberapa tahun terakhir, dengan puncak pada tahun 2024 (5 publikasi), diikuti oleh tahun 2025 (3 publikasi) dan 2026 (3 publikasi). Sebagian besar studi ini masih bersifat retrospektif atau hanya menyentuh permukaan implikasi strategis. Analisis prediktif, yang mengintegrasikan model-model skenario geopolitik dengan proyeksi ekonomi dan sosial Indonesia, akan sangat bermanfaat untuk persiapan kebijakan yang lebih matang (Penelitian et al., 2026). Aspek ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia tidak hanya reaktif, melainkan juga proaktif dalam menghadapi potensi krisis di masa mendatang.

Perbandingan respons dan adaptasi Indonesia dengan negara-negara non-blok atau kekuatan menengah lainnya dalam menghadapi konflik serupa juga merupakan area yang kurang terjamah. Pemahaman tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi oleh negara-negara dengan karakteristik serupa dapat memberikan pelajaran berharga bagi perumusan strategi Indonesia. Keterbatasan penelitian dalam menganalisis korelasi antara dinamika konflik regional di Timur Tengah dengan kebijakan dalam negeri Indonesia, seperti pergeseran prioritas pembangunan atau perubahan alokasi anggaran pertahanan, juga perlu diatasi. Kekurangan ini menghambat pemahaman yang holistik tentang bagaimana kebijakan luar negeri dan domestik saling mempengaruhi dalam konteks gejolak global (Hakiem et al., 2023).

Kontribusi dan Celah Penelitian

Sistematik literatur review ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman politik luar negeri Indonesia dalam merespons konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Penelitian ini menyintesis berbagai temuan yang sebelumnya tersebar, mengidentifikasi pola

konsistensi prinsip bebas aktif, peran Indonesia sebagai mediator, serta pengaruh kuat faktor domestik seperti Pancasila dan identitas Islam. Pemetaan dampak ekonomi dan ideologis eksternal terhadap Indonesia juga menjadi kontribusi penting, menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi Jakarta. Integrasi temuan lintas studi membantu mengidentifikasi konvergensi pandangan tentang peran mediasi Indonesia, seperti yang disoroti oleh (Gindarsah, 2012); (Mustofa & Zawawi, 2025), serta divergensi dalam fokus analisis dampak, di mana beberapa studi berfokus pada ekonomi sementara yang lain pada ideologi. Kontribusi utama kajian ini adalah menyediakan kerangka komprehensif bagi para pembuat kebijakan dan akademisi untuk memahami lanskap respons Indonesia terhadap salah satu konflik geopolitik paling krusial di dunia.

Meskipun memberikan sintesis yang berharga, kajian ini juga mengidentifikasi celah-celah penelitian krusial yang perlu diisi oleh agenda penelitian selanjutnya. Kebutuhan akan studi yang lebih mendalam mengenai implikasi spesifik konflik Iran-AS-Israel terhadap sektor-sektor strategis Indonesia, seperti keamanan energi dan stabilitas regional, menjadi sangat mendesak (Karso, 2025). Sebagian besar penelitian yang ditemukan cenderung bersifat deskriptif atau analitis terhadap peristiwa masa lalu, sedangkan studi yang bersifat prediktif dan prospektif masih minim, padahal sangat penting untuk merancang kebijakan yang antisipatif di masa depan (Penelitian et al., 2026). Tren publikasi menunjukkan minat yang meningkat terhadap topik ini, terutama pasca-2020, tetapi belum ada kajian yang secara khusus memproyeksikan secara rinci respons dan implikasi hingga tahun 2026 dan seterusnya, sesuai dengan judul artikel ini. Penelitian di masa depan harus berfokus pada model-model skenario dan analisis komparatif dengan negara-negara serupa untuk mengidentifikasi strategi adaptasi yang efektif.

Celah penelitian lain melibatkan analisis peran aktor non-negara dan dinamika opini publik yang lebih rinci dalam mempengaruhi formulasi kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik ini. Meskipun sentimen publik disebutkan (Wicaksana, 2022), studi yang mendalam tentang bagaimana sentimen ini dimobilisasi, disalurkan, dan pada akhirnya mempengaruhi keputusan politik masih terbatas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi secara lebih detail kapasitas Indonesia untuk melakukan diplomasi pertahanan ekonomi sebagai respons terhadap guncangan eksternal (Saragih et al., 2026). Pemahaman yang lebih mendalam tentang sinergi antara kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik dalam mengelola dampak konflik eksternal juga merupakan area yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Agenda penelitian mendatang harus memperhitungkan kompleksitas hubungan sebab-akibat antara peristiwa geopolitik global dan respons kebijakan nasional yang bersifat multidimensional. Kajian komparatif yang melibatkan pengalaman negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam menavigasi konflik serupa juga dapat memberikan perspektif berharga untuk memperkaya analisis kebijakan Indonesia.

KESIMPULAN

Kajian sistematis terhadap literatur politik luar negeri Indonesia menyingkap kompleksitas respons negara ini terhadap dinamika konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dalam satu dekade terakhir. Konsisten dengan identitas diplomatik tradisionalnya, Indonesia secara fundamental mengadopsi pendekatan seimbang, secara tegas mengedepankan perdamaian, dan menolak intervensi militer sebagai solusi. Analisis mendalam menunjukkan politik luar negeri Indonesia berupaya menavigasi kepentingan nasionalnya di tengah ketegangan geopolitik yang fluktuatif, seraya tetap memegang teguh prinsip non-blok yang telah lama dianut dan komitmen pada multilateralisme. Respons yang ditunjukkan bukan sekadar reaktif terhadap peristiwa, melainkan mencerminkan kalkulasi strategis yang matang terhadap implikasi potensial konflik regional dan global, baik dalam dimensi keamanan maupun ekonomi.

Tren respons politik luar negeri Indonesia sepanjang sepuluh tahun terakhir menunjukkan dominasi penekanan pada penyelesaian damai melalui saluran dialog dan diplomasi yang konstruktif. Indonesia secara konsisten menyuarakan seruan untuk de-eskalasi ketegangan, menolak penggunaan kekuatan militer sebagai alat penyelesaian sengketa, dan secara proaktif mendorong semua pihak yang terlibat untuk menahan diri dari tindakan provokatif. Dukungan

terhadap hak-hak rakyat Palestina dan advokasi solusi dua negara juga menjadi elemen fundamental yang secara signifikan mempengaruhi posisi Indonesia terhadap konflik yang melibatkan Israel, menempatkan isu kemanusiaan dan keadilan sebagai landasan moral diplomasi. Indonesia secara aktif memanfaatkan platform multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyuarakan sikapnya, memperkuat legitimasi diplomasi globalnya, serta membentuk konsensus internasional. Kebijakan ini menegaskan komitmen kuat Indonesia pada tatanan internasional yang berbasis aturan hukum dan keadilan, bukan pada kekuatan semata.

Prinsip dan strategi utama yang mendasari politik luar negeri Indonesia berakar kuat pada filosofi "Bebas Aktif" dan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan etika bernegara. Indonesia secara strategis memosisikan dirinya sebagai mediator potensial dan pembawa pesan perdamaian yang kredibel, tanpa memihak salah satu blok kekuatan secara eksplisit. Keterlibatan aktif dalam upaya menciptakan stabilitas regional dan global, mendorong dialog antarperadaban yang inklusif, dan praktik diplomasi kemanusiaan yang konkret, menjadi strategi yang menonjol dalam menghadapi konflik. Indonesia secara konsisten berupaya membangun jembatan komunikasi antara pihak-pihak yang berkonflik, kendati seringkali menghadapi keterbatasan pengaruh strukturalnya di panggung global yang didominasi kekuatan besar. Pendekatan ini mencerminkan aspirasi kuat Indonesia untuk secara substansial berkontribusi pada perdamaian dunia, sejalan dengan amanat konstitusinya yang luhur.

Implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons konflik tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejumlah tantangan dan kendala yang inheren. Indonesia menghadapi dilema signifikan dalam menjaga keseimbangan yang rapuh antara kepentingan ekonomi nasionalnya yang vital dengan prinsip-prinsip moral dan politik yang dipegang teguh. Tekanan diplomatik dari kekuatan global untuk mengambil posisi tertentu, dinamika politik domestik yang kompleks yang dapat mempengaruhi formulasi dan legitimasi kebijakan, serta keterbatasan kapasitas diplomatik dalam menghadapi isu-isu global yang sangat kompleks, menjadi faktor-faktor yang secara fundamental mempersulit. Kebijakan luar negeri juga harus secara cermat mempertimbangkan sentimen publik dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang memiliki pandangan kuat dan seringkali beragam terhadap isu konflik Timur Tengah, terutama isu Palestina, yang dapat mempengaruhi dukungan domestik terhadap kebijakan pemerintah. Tantangan eksternal berupa kompleksitas multidimensional konflik itu sendiri, dengan banyaknya aktor non-negara dan kepentingan geo-ekonomi yang saling bertentangan, menuntut kehati-hatian dan kecermatan ekstra dalam setiap langkah diplomatik.

Ketergantungan Indonesia pada energi dan perdagangan global juga secara signifikan mempengaruhi ruang gerak diplomasi negara ini. Fluktuasi harga minyak global dan potensi gangguan serius terhadap rantai pasok global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah menuntut Indonesia untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya aspiratif secara prinsipil, tetapi juga pragmatis dan realistis secara ekonomi. Indonesia harus secara cermat menyeimbangkan antara mempertahankan citranya sebagai negara non-blok yang independen dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat, termasuk negara-negara adidaya yang memiliki kepentingan strategis dan pengaruh substansial di kawasan tersebut. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih rumit karena membutuhkan koordinasi lintas sektor yang ketat dan analisis risiko yang mendalam, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga negara.

Penelitian mengenai politik luar negeri Indonesia dalam merespons konflik Iran, Amerika Serikat, dan Israel masih menyisakan sejumlah celah signifikan yang memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Studi-studi yang ada cenderung didominasi oleh analisis deskriptif historis atau bersifat normatif, dengan kurang mendalami aspek prediktif dan prospektif kebijakan luar negeri Indonesia di tengah potensi eskalasi konflik di masa depan (sesuai target tahun 2026). Analisis dampak konkret dari inisiatif diplomatik Indonesia, baik dalam skala regional maupun global, seperti resolusi PBB yang didukung atau bantuan kemanusiaan yang diberikan, belum banyak dieksplorasi secara mendalam dengan kerangka evaluasi yang kuat. Peran aktor non-negara, seperti organisasi

masyarakat sipil, cendekiawan, atau kelompok kepentingan tertentu, dalam membentuk atau mempengaruhi respons kebijakan luar negeri juga belum mendapat perhatian yang memadai dari perspektif agensi dan struktur. Kajian yang bersifat komparatif dengan pengalaman negara-negara non-blok lainnya dalam konteks serupa juga masih terbatas, sehingga menyulitkan evaluasi efektivitas relatif kebijakan Indonesia dan identifikasi praktik terbaik.

Celah penelitian juga mencakup kurangnya studi longitudinal yang secara sistematis melacak evolusi kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespons konflik yang berlarut-larut, mengidentifikasi titik balik dan adaptasi strategis. Analisis mendalam mengenai kapasitas kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait lainnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri yang efektif dan responsif juga masih minim, termasuk aspek kapasitas sumber daya manusia dan teknologi. Keterbatasan data empiris kuantitatif tentang biaya dan manfaat ekonomi dari kebijakan tertentu, atau survei opini publik yang komprehensif mengenai persepsi masyarakat terhadap kebijakan luar negeri di isu ini, juga merupakan area yang perlu diisi untuk memberikan landasan bukti yang lebih kuat. Integrasi perspektif keamanan siber dan informasi dalam konteks diplomasi di era digital sebagai bagian integral dari respons konflik, termasuk disinformasi dan perang narasi, juga belum banyak dikaji.

Arah penelitian selanjutnya dapat secara spesifik fokus pada studi longitudinal untuk menganalisis adaptasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap perubahan dinamika geopolitik global dan regional secara berkelanjutan. Penelitian komparatif dengan negara-negara non-blok lainnya di Asia Tenggara, Asia Selatan, atau Afrika dapat memberikan wawasan baru tentang strategi diplomatik yang efektif dan inovatif dalam menghadapi konflik serupa. Analisis berbasis kebijakan yang lebih spesifik, mengkaji instrumen diplomatik tertentu (misalnya, diplomasi maritim, diplomasi publik, atau diplomasi ekonomi) dalam merespons konflik, akan sangat memperkaya pemahaman praktis. Studi yang mengintegrasikan secara holistik faktor-faktor domestik, seperti opini publik, dinamika partai politik, dan pengaruh kelompok kepentingan, dengan formulasi dan implementasi kebijakan luar negeri juga sangat direkomendasikan. Penelitian masa depan perlu memanfaatkan pendekatan multidisiplin yang kuat, menggabungkan ilmu politik, ekonomi internasional, studi keamanan, dan bahkan sosiologi, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, mendalam, dan prediktif mengenai peran Indonesia di panggung global yang terus berubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, H., Razak, M., & Zakaria, S. (2021). Indonesian progressive Muslims and the discourse of the Israeli-Palestinian peace: Soekarno's, Abdurrahman Wahid's and Ahmad Syafii Maarif's thoughts. *Journal of Systems and Software*, 17, 1–20. <https://doi.org/10.21831/jss.v17i1.34843>
- Burton, G. (2021). Middle power behavior under multipolarity: Indonesia and Malaysia in the Middle East since the Arab uprisings. *Asian Politics & Policy*. <https://doi.org/10.1111/aspp.12577>
- Dinda, D., Kurniadi, A., Prakoso, L. Y., Setiawibawa, R., & Uksan, A. (2025). The Role Of Developing Countries In Global Conflict Mediation: A Comparative Study Of Indonesia And Turkiye. *Social Science Studies*. <https://doi.org/10.47153/sss56.22012025>
- Gindarsah, I. (2012). Democracy and Foreign Policy-Making in Indonesia: A Case Study of the Iranian Nuclear Issue, 2007–08. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 34, 416–437. <https://doi.org/10.1355/cs34-3e>
- Hakim, F. N., Putri, L. D. M., & Gustianti, N. A. (2023). DAMPAK NORMALISASI HUBUNGAN DIPLOMATIK ISRAEL DAN NEGARA-NEGARA ARAB TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DI TIMUR TENGAH. *Jurnal Dinamika Global*. <https://doi.org/10.36859/jdg.v8i2.1883>
- Julianingtias, Y. (2024). Karakter Kebijakan Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Debasen (MUDE)*. <https://doi.org/10.37676/mude.v3i1.5560>

- Juntami, A. P. (2023). PANCASILA AND PEACE: PERAN INDONESIA DALAM MEDIASI KONFLIK ISRAEL-PALESTINA; IMPLEMENTASI PANCASILA PADA DIPLOMASI PERDAMAIAN DUNIA. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. <https://doi.org/10.33172/jdp.v9i3.14503>
- Karso, A. (2025). IRAN-ISRAEL SALING SERANG HARGA MINYAK MENTAH MERANGKAK NAIK DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI RI. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.62335/sinergi.v2i7.1471>
- Muhammad, A., Candra, I. A., & Sahide, A. (2024). Identity and Foreign Policy: Comparative Studies of Indonesian and Malaysian Foreign Policies in Relation to Israel. *UNISCI Journal*. <https://doi.org/10.31439/unisci-200>
- Mustofa, R., & Zawawi, M. (2025). The Aspirations of the Indonesian Nation in Anis Matta's Speech "Kullunā Fālāstīn" Critical Discourse Analysis Norman Fairclough's Theory. *Mantiqutayr: Journal of Arabic Language*. <https://doi.org/10.25217/mantiqutayr.v5i2.5689>
- Penelitian, A., Amalia, R., Musannah, A. M., & Nurhayati, D. (2026). Dampak Konflik Iran-Israel terhadap Negara Perdagangan Indonesia. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v7i1.8591>
- Putra, N. R. E., Rasyadan, R. R., Ramadhan, N. A. S., & Safitri, I. (2024). Kebijakan Pemerintah Indonesia Terkait dengan Diplomasi di Kawasan Timur Tengah (Studi Hubungan United Arab Emirates - Israel). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i4.4713>
- Saragih, A., Ronaldo, D., & Saputra, A. (2026). ANALISIS SENTIMEN PUBLIK INDONESIA TERHADAP KONFLIK ISRAEL-IRAN DI MEDIA SOSIAL MENGGUNAKAN INDOBERT DAN EXPLAINABLE AI (LIME). *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Bidang Teknik Informatika*. <https://doi.org/10.47111/jti.v20i1.24465>
- Setyowati, A. (2023). Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4812>
- Songbatumis, A. (2021). The Role of Islam in Indonesian Foreign Policy: A Case of Susilo Bambang Yudhoyono Introduction. *Polish Political Science Yearbook*. <https://doi.org/10.15804/ppsy202119>
- Ubaedillah, A., Ali, M., & Arfino, B. (2022). Articulation of Islam: President Joko Widodo's Foreign Policy 2014-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i2.13138>
- Wicaksana, I. (2022). Why does populism not make populist foreign policy? Indonesia under Jokowi. *Australian Journal of International Affairs*, 76, 634–652. <https://doi.org/10.1080/10357718.2022.2071834>